

Determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia

Debbie Aryani Tribudhi¹, Soeharjoto Soekapdjo^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Jakarta Barat, Indonesia.

Email: ryoto16@yahoo.com, Telp: +628164838782

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia, dengan menggunakan data runtun waktu, berupa bulanan, pada 2013-2017, dan berasal dari Bank Indonesia. Metodenya menggunakan regresi, yang variabel terikatnya jumlah transaksi keuangan elektronik, serta variabel bebasnya berupa jumlah uang elektronik beredar dan infrastruktur uang beredar. Adapun hasilnya adalah nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,8952, dengan variabel jumlah uang beredar elektronik dan infrastruktur uang beredar mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia. Kondisi ini kondusif guna mendukung SDGs di Indonesia, yang terkait dengan tujuan ke 9 dan 10.

Kata Kunci: Jumlah transaksi keuangan elektronik; jumlah uang elektronik beredar; infrastruktur uang beredar; sustainable development goals (sdgs)

Determination of transactions using electronic money in Indonesia

Abstract

Purpose of this study is to know about transaction determination using electronic money in Indonesia. Data was taken from Bank Indonesia monthly time series data from 2013-2017. Using regression methods, with number of financial electronic transaction as a dependent variable, and electronic money supply and money supply infrastructure as a independent variable. Result shown that determination coefficient (R^2) is 0.8952 with electronic money supply variable and money supply infrastructure have positive influence to electronic money transaction variable in Indonesia. This is a conducive condition to supporting Sustainable Development Goals (SDG) in Indonesia, related to 9th and 10th goals.

Keywords: *Financial electronic transactions; electronic money supply; money supply infrastructure; sustainable development goals (sdgs)*

PENDAHULUAN

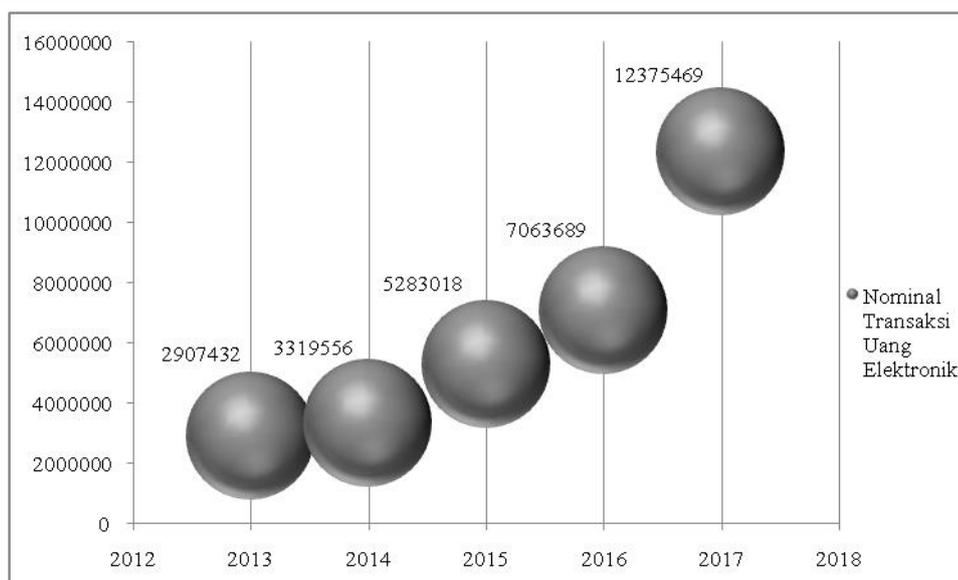
Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, terus mengalami pertumbuhan yang baik, walaupun banyak mengalami dampak negatif dari ekonomi global (The World Bank, 2018). Adapun indikator yang digunakan sebagai keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya produk domestik bruto (PDB), namun juga perlu ditunjang dengan distribusi pendapatan yang merata (Soeharjoto, 2018). Perbankan, merupakan institusi yang dijadikan penggerak roda perekonomian suatu negara (Nugroho, 2017). Lembaga tersebut dapat diandalkan karena merupakan pihak yang dapat menjembatani permasalahan yang dihadapi produsen dan konsumen (Usman, 2018).

Guna menunjang kelancaran aktivitas produsen, yang dapat dengan cepat diapresiasi konsumen, diperlukan jasa pihak pemasaran (Kotler, 2017). Dalam melakukan kegiatannya, pihak pemasaran berupaya agar perusahaan juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga perusahaan berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan (Arafah, 2018). Pihak ini, juga memotivasi perusahaan untuk memperhatikan pelanggannya dengan baik, agar dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah secara optimal, sehingga pelanggan akan merasa puas (Kotler, 2016). Pada saat ini dengan semakin banyaknya pesaing, perusahaan perlu melakukan strategi pemasaran baik untuk jangka pendek dan jangka panjang, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman, terutama yang terkait dengan pihak yang memiliki potensi untuk melakukan transaksi (Pradana, 2017). Adanya perkembangan zaman yang semakin pesat, membuat perilaku dan budaya masyarakat juga berubah, yang merupakan dampak dari adanya perkembangan teknologi (Sihotang, 2016). Perubahan ini, berdampak pada trend masyarakat yang menginginkan hidup lebih praktis dan berkualitas, termasuk dalam proses transaksi pembayarannya.

Pembayaran merupakan komponen penting dalam menunjang kelancaran aktivitas dari transaksi barang dan jasa. Dengan berkembangnya dinamika kehidupan, berdampak pada adanya tuntutan pelaksanaan pembayaran, agar dapat berjalan dengan cepat, aman dan efisien. Inovasi dalam pembayaran yang memanfaatkan teknologi merupakan solusi tepat. Perbankan sebagai lembaga intermediary, melalui bank Indonesia telah mengatur dan memfasilitasi pembiayaan melalui teknologi tersebut (Soeharjoto, 2018). Kebijakan ini, dilakukan bank sentral dengan membuat Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Hal ini, dapat terealisasi karena dalam melakukan transaksinya secara kontan, yang didebet dari dana yang tersedia, sehingga dapat mengurangi dampak inflasi. Kondisi ini sesuai dengan yang diungkapkan Fisher (1930), bahwa percepatan transaksi ditentukan dengan institusi yang mengelola dalam sistem pembayarannya, sehingga adanya dukungan kepercayaan dari masyarakat akan meningkatkan pemanfaatan uang elektronik. Adapun dampaknya dengan semakin banyaknya transaksi masyarakat yang menggunakan uang elektronik, akan terjadi pengalihan dan meningkatkan jumlah uang elektronik beredar.

Perkembangan inovasi sistem pembayaran di Indonesia semakin pesat, karena di dukung pemerintah, dengan memberikan fasilitas berupa inovasi di bidang infrastruktur teknologi informasi. Dalam melakukan transaksi pembayaran saat ini, dapat melibatkan pihak bank maupun non bank. Dengan demikian, kini telah terjadi pergeseran dari pembayaran yang menggunakan paper based instrument ke card based dan electronic based instrument.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik sudah dilakukan semenjak 2007 (Bank Indonesia, 2009). Namun demikian, ternyata instrumen pembayaran elektronik sampai saat ini justru semakin booming, bila dibandingkan dengan alat pembayaran lainnya. Pada 2013-2017 terjadi rata-rata pertumbuhan transaksi uang elektronik secara nominal sebesar 45,56 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada 2017 sebesar 75,2 persen dan terendah pada 2014 sebesar 14,18 persen.



Gambar 1. Nominal Transaksi Uang Elektronik di Indonesia, Pada 2013-2017 (Rp. Juta)

Sumber: Bank Indonesia

Produksi merupakan proses untuk meningkatkan nilai guna atas suatu barang, dengan memanfaatkan sumber daya berupa bahan baku, tenaga kerja, modal, mesin dan sumber daya lainnya (Cobb, 1928). Besar kecilnya suatu tingkat produksi tergantung dari jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Namun, pada kenyataannya faktor produksi yang dimiliki perusahaan terdapat kendala (constraint) berupa adanya keterbatasan (Hansen, 2008). Hal ini, menyebabkan pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasinya, dengan mengambil langkah melakukan identifikasi terhadap kendala yang dihadapi, yakni melalui *theory of constraint* (Rahman, 1998). Pendekatan *theory of constraint* (TOC) merupakan upaya dari perusahaan agar dapat meningkatkan laba dengan membuat sistem yang dapat menekan biaya produksi melalui efisiensi, sehingga yang tadinya menjadi kendala dapat diatasi. Hal ini juga yang dilakukan pihak perbankan dan perusahaan non bank, dalam upayanya untuk penunjang kelancaran dari transaksi uang elektronik, melalui penyediaan infrastruktur uang beredar berupa mesin rider. Dengan adanya alat ini, akan memperlancar dalam mengatasi kendala yang dihadapi pihak produsen dan konsumen, terutama yang terkait dengan sistem pembayarannya.

Era digital tidak terlepas dari adanya kemajuan inovasi teknologi di segala bidang, termasuk dalam sistem pembayaran. Sistem ini, manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat sampai di daerah pelosok, sehingga dapat mempercepat mengatasi ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia. Adanya penelitian ini, akan dapat memberikan informasi terkait dengan upaya pengembangan pemanfaatan uang elektronik di Indonesia, yang sesuai dengan target SDGs tujuan ke 9 dan 10 (Bappenas, 2017).

METODE

Penelitian determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia, menggunakan data runtun waktu, berupa bulanan, pada 2013-2017, yang berasal dari Bank Indonesia. Metode yang digunakan regresi, dengan jumlah transaksi keuangan elektronik sebagai variabel terikat dan jumlah uang elektronik beredar serta infrastruktur uang beredar sebagai variabel terikatnya. Adapun model yang digunakan:

$$JT = \beta_0 + \beta_1 JUEB + \beta_2 IUB + \varepsilon_0$$

Keterangan:

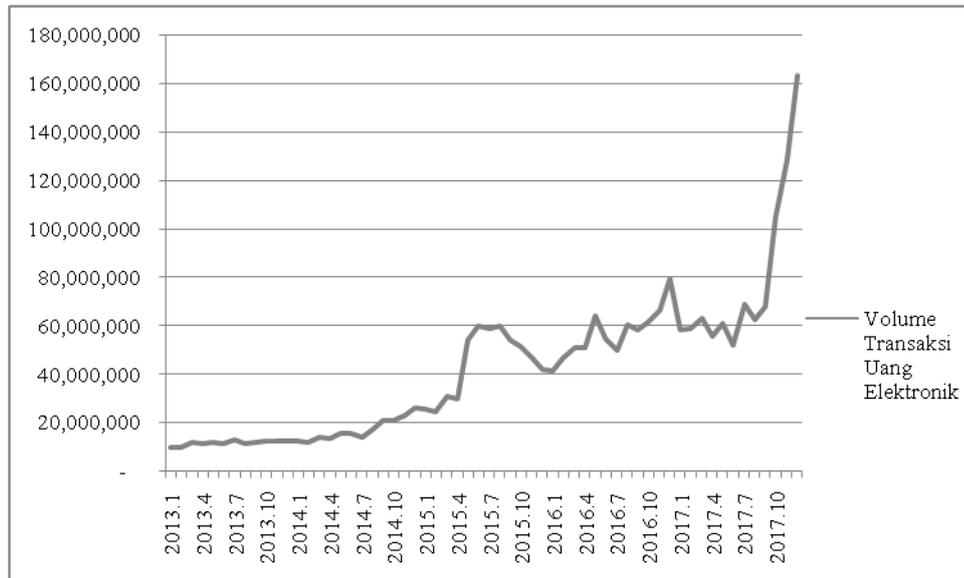
JT = Jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia (Rp. Juta).

JUEB = Jumlah uang beredar elektronik di Indonesia (Rp).

IUB = Infrastruktur uang beredar di Indonesia (Unit).

HASIL DAN PEMBAHASAN

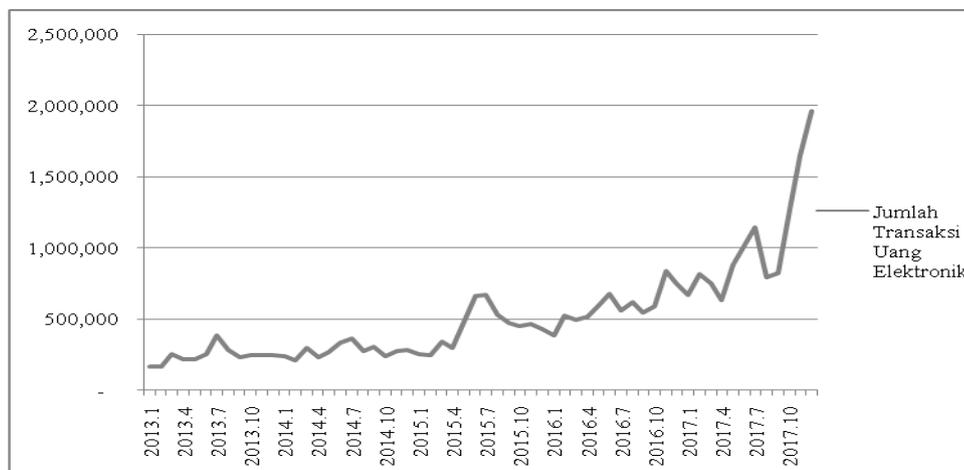
Perkembangan transaksi keuangan elektronik di Indonesia baik secara volume dan jumlah sangat pesat. Volume transaksi uang elektronik pada 2013.1 sebesar 9.597.739 menjadi sebesar 163.301.280 di 2017.12. Rata-rata pertumbuhan volume transaksi uang elektronik pada 2013.1-2017.12 sebesar 6,12 persen atau sebanyak 41.721.726. Pertumbuhan tertinggi, terjadi pada 2015.5 sebesar 81,03 persen dan terendahnya pada 2017.1 sebesar minus 26,24 persen.



Gambar 2. Volume Transaksi Uang Elektronik di Indonesia, Pada 2013.1-2017.12

Sumber: Bank Indonesia

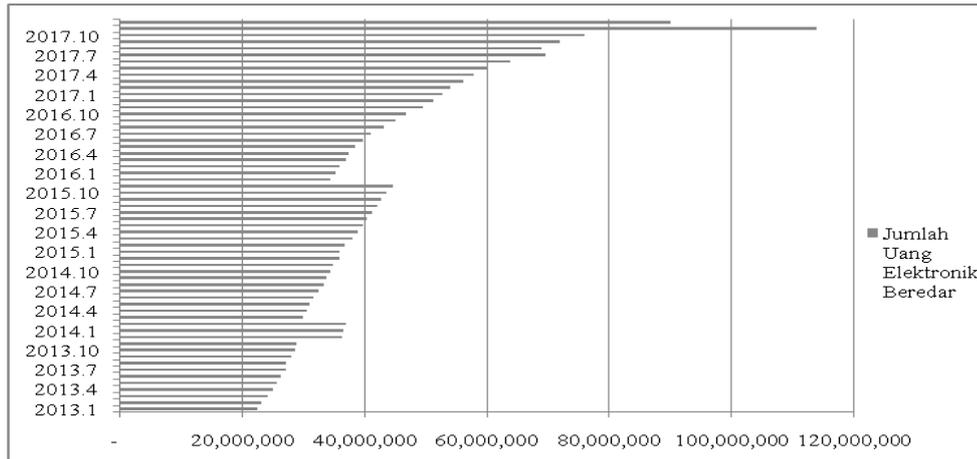
Jumlah transaksi uang elektroniknya pada 20013.1-2017.12 mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,45 persen. Adapun jumlah transaksinya yang hanya sebesar Rp. 168,394 juta pada 2013.1, kemudian bertambah menjadi sebesar Rp. 5.886.152 juta di 2017.12. Keadaan ini, tidak terlepas dari perkembangan informasi dan teknologi, serta kondisi ekonomi di Indonesia. Untuk pertumbuhannya, yang tertinggi terjadi pada 2015.5 sebesar 62,15 persen dan terendahnya sebesar minus 30,73 persen pada 2017.8, dengan deviasi standar sebesar 22,47 persen.



Gambar 3. Jumlah Transaksi Uang Elektronik di Indonesia, Pada 2013.1-2017.12 (Rp. Juta)

Sumber: Bank Indonesia

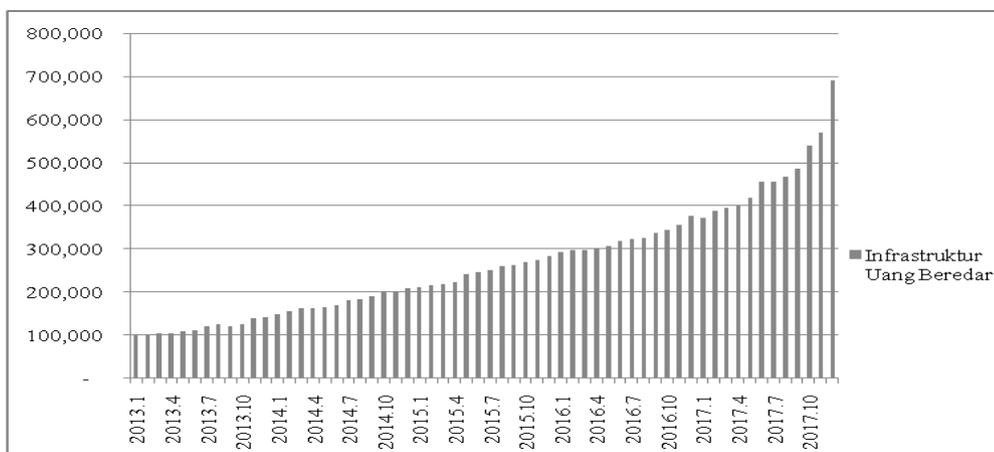
Animo masyarakat dalam menempatkan dananya di uang elektronik cukup besar, terutama dengan adanya dorongan kebijakan dari pemerintah terhadap cara pembayaran yang mewajibkan menggunakan uang elektronik, dan semakin maraknya bisnis yang menggunakan transaksi melalui sistem pembayaran online. Rata-rata pertumbuhan jumlah uang beredar elektronik pada 2013.1-2017.12 sebesar 5,32 persen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 49,94 persen pada 2017.11 dan terendah pada 2015.12 yakni sebesar minus 22,96 persen, dengan deviasi standar sebesar 8,9 persen. Peningkatan jumlah uang beredar elektroniknya cukup besar, yang pada 2013.1 sebanyak Rp. 22.418.799 menjadi Rp. 90.003.848 di 2017.12. Padahal sebenarnya, pada 2017.11 penggunaannya sempat mencapai sebesar Rp. 113.722.577.



Gambar 4. Jumlah Uang Elektronik Beredar di Indonesia, Pada 2013.1-2017.12 (Rupiah)

Sumber: Bank Indonesia

Semakin berkembangnya pemanfaatan uang elektronik, pihak jasa keuangan juga meningkatkan jumlah infrastruktur uang beredar dengan menggunakan mesin rider. Pertumbuhan infrastruktur uang beredar mengalami peningkatan selama 2013.1-2017.12 dengan rata-rata 4,53 persen, yang pertumbuhannya tertinggi pada 2017.12 sebesar 21,32 persen dan terendahnya pada 2013.9 sebesar minus 2,75 persen. Keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan penggunaan uang elektronik terlihat jelas, dengan melakukan kebijakan melalui peningkatan penyediaan infrastruktur uang elektronik yang signifikan, pada 2013.1 berjumlah 98.275 unit menjadi sebanyak 691.331 unit di 2017.12.



Gambar 5. Infrastruktur Uang Beredar di Indonesia, Pada 2013.1-2017.12 (Unit)

Sumber: Bank Indonesia

Dari hasil perhitungannya diperoleh nilai F sebesar 239,2193 dan prob. Sig. sebesar 0,0000, yang berarti nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,005. Adapun kesimpulannya adalah variabel jumlah uang beredar elektronik dan Infrastruktur uang beredar secara simultan berpengaruh terhadap jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia. Nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0,8952, yang artinya bahwa variabel jumlah uang beredar elektronik dan infrastruktur uang beredar dapat menjelaskan terhadap variabel jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia sebesar 89,52 persen, sedangkan sisanya yang 10,48 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel jumlah uang beredar elektronik dan infrastruktur uang beredar terhadap variabel jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia dapat dilakukan dengan uji t. Adapun hasilnya adalah:

Tabel 1. Hasil Uji t Statistik Jumlah Transaksi Uang Elektronik di Indonesia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-240867	42673.08	-5.64447	0.0000
JUEB	0.009501	0.002405	3.949962	0.0002
IUB	1.335299	0.308222	4.332263	0.0001

Sumber: Hasil data diolah

Analisis dari hasil pengaruh secara parsial dari persamaan regresi jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia adalah sebagai berikut:

Hasil dari pengujian jumlah uang beredar elektronik terhadap jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia, diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar 0,009501, yang berarti jumlah uang beredar elektronik berpengaruh positif terhadap jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia. Artinya dengan meningkatnya jumlah uang beredar elektronik akan meningkatkan jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia dan sebaliknya dengan menurunnya jumlah uang beredar elektronik akan menurunkan jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah uang beredar elektronik terbukti berpengaruh positif terhadap jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia, karena nilai prob. dari jumlah uang beredar elektronik sebesar 0,0002 lebih kecil dari 0,005.

Hasil dari pengujian infrastruktur uang beredar terhadap jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia, diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar 1,335299, yang berarti infrastruktur uang beredar berpengaruh positif terhadap jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia. Artinya dengan meningkatnya infrastruktur uang beredar akan meningkatkan jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia, dan sebaliknya dengan menurunnya infrastruktur uang beredar akan menurunkan jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur uang beredar terbukti berpengaruh positif terhadap jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia, karena nilai prob. dari infrastruktur uang beredar sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,005.

SIMPULAN

Penelitian determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia diperoleh nilai R^2 sebesar 0,8952. Variabel jumlah uang beredar elektronik dan infrastruktur uang beredar mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut, menunjukkan bahwa semakin luasnya penggunaan transaksi dengan uang elektronik yang dilakukan masyarakat, sehingga perlu dibuat aturan yang dapat meminimalkan kerugian dari semua pihak dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. Kondisi ini, dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sampai di daerah terpencil, sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, yakni membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membantu perkembangan inovasi (tujuan ke 9) dan mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara (tujuan ke 10).

DAFTAR PUSTAKA

Arafah, Willy., Lucky Nugroho, Rowlan Takaya, Soeharjoto Soekapdjo. (2018). Marketing Strategy for Renewable Energy Development In Indonesia Context Today. *International Journal of Energy Economics and Policy*. 8(5). 181-186.

-
- Bappenas. (2017). Arahan Terkait Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Goals Development (SDGs). Sosialisasi Penyusunan RAD TPB/SDGs Semarang. 15 Desember.
- Bank Indonesia. (2009). Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Direktorat Pengedaran Uang.
- Cobb, C. W. and Douglas, P. H. (1928). A Theory of Production. American Economic Review. 18(1). 139–165.
- Fisher, Irving. (1930). The Theory of Interest. New York: Macmillan.
- Hansen, Don R. and Maryanne M. Mowen. (2008). Cost Management: Accounting and Control. 6th ed. South Western Educational Publishing.
- Kotler, Philip T. and Gary Armstrong. (2017). Principles of Marketing. 17th ed. Pearson.
- Kotler, Philip T. and Kevin Lane Keller, (2016). Marketing Management, 15th ed. Pearson.
- Nugroho, Lucky., Wiwik Utami, Caturida Meiwanto Doktorlina, Soeharjoto Soekapdjo, Tengku Chandra Husnadi. (2017). Islamic banking capital challenges to increase business expansion (Indonesia cases). International Journal of Commerce and Finance. Vol. 3. Issue 2. 1-10.
- Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- Pradana, Dedhy., Syarifah Hidayah, Rahmawati. (2017). Pengaruh harga kualitas produk dan citra merek brand image terhadap keputusan pembelian motor. KINERJA. 14(1). Januari.16-23.
- Rahman, Shams-ur. (1998). Theory of constraints: A review of the philosophy and its applications. International Journal of Operations & Production Management, 18(4). 336 – 355.
- Soeharjoto Soekapdjo, Lucky Nugroho, Ahmad Badawi, Wiwik Utami. (2018). Bad debt issues in Islamic bank: macro and micro influencing (Indonesia cases). International Journal of Commerce and Finance. Vol. 4, Issue 1. 10-26.
- Soeharjoto. (2018). Kemampuan dan kinerja keuangan provinsi Kalimantan. AKUNTABEL. 15(2). September.131-138.
- Sihotang, Ellen Theresia. (2016). Faktor penentu yang mempengaruhi penggunaan layanan internet banking. KINERJA. 13(1). Januari. 25-36.
- The World Bank. (2018). Menuju Pertumbuhan Inklusif. Indonesia Economic Quarterly. Maret
- Usman, Bahtiar., Syofriza Syofyan, Lucky Nugroho, Soeharjoto. (2018). Foreign Bank Penetration And Its Impact On Banking Industries. Eurasian Journal of Economics and Finance. 6(1), 64-83.
- www.Bi.go.id